

ABSTRAK

Indra Budi Jaya: *Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.*

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda pemudi merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Guna memenuhi harapan tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan hadir dalam rangka memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga Negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktifitas kepemudaan dan organisasi kepemudaan. Namun pada penerapannya masih belum dilaksanakan secara efektif dan konsisten oleh Organisasi Kepemudaan dalam hal ini perihal Kriteria pemuda seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria atau definisi pemuda pemudi secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui konsistensi penerapan hukum undang-undang kepemudaan terhadap pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat dan konsekuensi hukum terhadap penerapan hukum kriteria Pemuda di kalangan Organisasi kepemudaan..

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan Studi komparatif dan sinkronisasi Hukum Horizontal dan Vertikal. Penulisan Tesis ini menggunakan Kerangka teoritis yaitu Teori Negara Hukum, Teori Hukum dan Pembangunan, Teori Efektifitas Hukum dan Teori Fiksi Hukum. Sedangkan Kerangka konseptualnya adalah peraturan perundangundangan dalam sistem hukum, undang-undang, Pemuda, Kepemudaan dan Organisasi kepemudaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) mengenai criteria pemuda dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan kepemudaan, namun dalam konsistensi penarapan hukumnya belum dilaksanakan secara efektif dan parsial, sehingga konsekuensinya setiap perbuatan berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum dan menghilangkan hak pemuda dan organisasasi kepemudaan terhadap pelayanan kepemudaan baik sarana maupun prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Kriteria, Pemuda, Organisasi Kepemudaan.*

ABSTRACT

Indra Budi Jaya *Implementation of the Law of Youth Criteria Among Youths and Youth Organizations In West Java Is Associated By Law Number 40 Year 2009 About Youth.*

In the process of nation building, young men are moral strength, social control, and agent of change as the embodiment of its function, role, characteristic, and strategic position in national development. In order to meet this expectation, Law Number 40 Year 2009 on Youth is present to strengthen the positions and opportunities of every citizen aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years to develop the potential, capacity, self-actualization, and ideals . As such, the law is intended to provide assurance of protection and legal certainty for the existence and activities of youth and youth organizations. However, the application has not been implemented effectively and consistently by the Youth Organization in this case concerning Youth Criteria as stated in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2009 on Youth.

This study aims to determine the criteria or definition of youth youth in accordance with prevailing laws and regulations, to know consistency of the application of youth law law to youth and Youth Organization in West Java and legal consequences to the application of Youth law criteria among youth organizations.

This research is conducted by using the normative juridical method that is research on the laws and regulations relating to the object of research on Primary, Secondary and Tertiary legal materials with Comparative Study approach and Horizontal and Vertical Law synchronization.

The thesis uses theoretical framework of State Law Theory, Theory of Law and Development, Theory of Law Effectiveness and Legal Fiction Theory. While the conceptual framework is the legislation in the legal system, laws, Youth, Youth and Youth organizations.

The results showed that the implementation of Article 1 paragraph 1 regarding youth criteria implemented according to Law No. 40 of 2009 on and Local Regulation of West Java Province No. 8 of 2016 on Youth Services, but in consistency of the law has not been implemented effectively and partially, so the consequences Any potential deeds to be unlawful and eliminate youth rights and youth organization to youth services both facilities and infrastructure provided by the local government.

Keywords : *Criteria, Youth, Youth Organizations.*